

ABSTRAK

REGULASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TRANSAKSI ASET KRIPTO: KOMPARASI SUBJEK PAJAK DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Oleh: Pandu Abi Nugraha*

Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat mengatur pajak penghasilan terhadap aset kripto dari aspek subjek pajaknya, serta bagaimana peraturan mengenai subjek pajak terhadap transaksi aset kripto dalam hukum Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau melalui asas *fairness*. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif, dengan sifat penelitian berupa deskriptif deduktif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga bahan hukum primer.

Penelitian ini melahirkan dua kesimpulan. Pertama, Indonesia mengatur subjek pajak penghasilan transaksi aset kripto dalam PMK No. 68/PMK.03/2022, sedangkan Amerika Serikat menggunakan subjek pajak umum dalam pemungutan pajak transaksi aset kripto. Kedua, pengaturan mengenai subjek pajak yang ada di PMK *a quo* belum memenuhi asas *fairness* dikarenakan tidak terpenuhinya *benefit principle*. Hal ini berlainan dengan Amerika Serikat yang menerapkan subjek pajak yang umum sehingga semua pelaku transaksi kripto mendapatkan peraturan perpajakan yang sama.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, Transaksi Aset Kripto, Komparasi Hukum.

* Mahasiswa Departemen Hukum Pajak program Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ABSTRACT

REGULATION OF INCOME TAX COLLECTION FOR CRYPTO ASSETS TRANSACTIONS: A COMPARISON OF TAX SUBJECTS IN INDONESIA AND THE UNITED STATES

By: Pandu Abi Nugraha*

This study aims to analyze how Indonesia and the United States regulate income tax on crypto assets in terms of their tax subjects and to evaluate the regulations on tax subjects for crypto assets transactions in Indonesian and U.S. law through the fairness principle. This study adopts a normative juridical approach with a descriptive deductive nature, utilizing secondary data and primary legal sources.

Based on the research and analysis done by this legal study, two conclusions were obtained. Firstly, Indonesia regulates the income tax subject of crypto assets transactions in PMK No. 68/PMK.03/2022, while the United States employs a general tax subject in taxing crypto assets transactions. Secondly, the regulation of tax subjects in the aforementioned PMK does not fully comply with the fairness principle due to the non-fulfillment of the benefit principle. This contrasts with the United States, which applies a general tax subject, ensuring uniform taxation regulations for all crypto assets transactions.

Keywords: *Income Tax, Crypto Assets Transactions, Comparative Law.*

* Student at the Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.